

Judul : Contoh Thailand, UKM Wisata butuh layanan terpadu
Tanggal : Kamis, 20 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Contoh Thailand UKM Wisata Butuh Layanan Terpadu

ANGGOTA Komisi VII DPR Hendry Munief mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf). Sektor UMKM memiliki peran vital sebagai penggerak ekonomi nasional dan perlu mendapatkan perhatian di dalam program-program kementerian.

Hendry mengapresiasi data yang menunjukkan dominasi sektor usaha wisata di Indonesia, termasuk pertumbuhan signifikan dari tayangan film dan industri kreatif. Sayangnya, hingga saat ini belum ada agenda yang langsung menyentuh penguatan UMKM pariwisata.

"Terkait dengan program UMKM dan ekraf secara spesifik, belum terlihat. Celah itu perlu segera diisi dengan kebijakan yang lebih terarah," kata anggota Fraksi PKS itu dalam keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Untuk memperkuat arah kebijakan, dia memberikan sejumlah rekomendasi berdasarkan praktik negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia dalam mengembangkan UMKM pariwisata. Thailand berhasil mengembangkan model *one stop service* untuk mempermudah perizinan dan akses dokumen bagi pelaku UMKM.

"Pemerintah mereka menyediakan layanan terpadu untuk UMKM pariwisata, mempermudah perizinan dan akses berbagai dokumen. Saya pikir

kita perlu ada layanan khusus seperti ini," jelasnya.

Sedangkan Vietnam fokus pada integrasi digital serta pemberian insentif pajak untuk mendorong adopsi teknologi dan mengurangi beban finansial UMKM. Sementara Malaysia sukses memperkuat pariwisata halal melalui sertifikasi yang dijalankan secara masif.

Menurutnya, langkah tersebut terbukti menarik minat wisatawan Muslim dari berbagai negara. "Saya lihat sendiri di bandara Malaysia, banyak wisatawan Muslim dari negara-negara Arab yang datang," ungkapnya.

Hendry juga mendorong ada kebijakan pembiayaan, kemitraan, dan keberlanjutan bagi UMKM pariwisata, termasuk integrasi data dan skema pendanaan kolaboratif bagi desa wisata. Perlu ada sinergi antara APBN, APBD, dan CSR untuk memperkuat infrastruktur dan pengelolaan desa wisata.

"Kolaborasi itu penting untuk pembiayaan, kemitraan, dan keberlanjutan UMKM. Termasuk infrastruktur pengelolaan sampah dan manajemen desa wisata," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Putra Nababan menilai, diperlukan strategi pariwisata yang lebih nyata dalam mendukung UMKM serta pelaku Ekraf. Target Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendatangkan 22 juta wisatawan mancanegara dengan potensi devisa Rp 370 triliun pada 2026 masih belum cukup ambisius. ■ PYB